

## ABSTRAK

Kata kunci: Proses Mediasi, Pengadilan Agama, PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016” yang ditulis oleh Umi Afifah, NIM. 3222113013, pembimbing Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag

Mediasi merupakan proses musyawarah dalam menyelesaikan masalah, hal ini bisa dilakukan di ranah litigasi dan non litigasi. Mediasi merupakan proses yang wajib dilaksanakan di pengadilan. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Fokus penelitian dalam kajian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung?. (2) Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung serta ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Penelitian ini bermanfaat untuk para akademisi dan praktisi pengadilan sebagai sumbangan pemikiran dalam prosedur mediasi rujukan untuk menerapkan yang sesuai. Serta bagi pemerintah, sebagai bahan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan pentingnya optimalisasi penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah.

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (*case study*). Dalam proses pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memfokuskan kajiannya pada prosedur mediasi. Sedangkan data yang diambil menggunakan metode wawancara dengan mediator dan para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Tulungagung dan observasi serta dokumentasi di lingkungan pengadilan tersebut. Selanjutnya data diolah dan dipilah-pilah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa (1) berdasarkan hasil penelitian dan data dari pihak pengadilan diketahui bahwa proses mediasi itu terdiri pra mediasi, proses mediasi dan pasca mediasi (2) Pihak pengadilan memang secara tidak langsung Pengadilan Agama Tulungagung telah menjalankan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun beberapa hal pun juga belum bisa dilaksanakan seperti halnya resume dari para pihak. Pihak pengadilan agama berdalih hal ini lebih sukar dijalankan mengingat pembuatan resume ini akan memotong waktu mediasi. Sehingga pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung secara keseluruhan telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 walaupun aturan ini masih bersifat baru.

## **ABSTRACT**

Keywords: Mediation Process, Religious Court, PERMA No. 1 of 2016

Thesis with the title "Implementation of Mediation in Tulungagung Religious Courts in Perspective Supreme Court Regulation No. 1 Year 2016" by Umi Afifah, NIM. 3222113013, supervisor Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag

Mediation is a process of deliberation in solving the problem, this can be done in the realm of litigation and non-litigation. Mediation is a process that must be carried out in the courts. It is set in the Supreme Court Regulation No. 1 Year 2016 on Procedures for Mediation in the Court.

The focus of research in this study are (1) How is the implementation of mediation in the Religious Court Tulungagung ?. (2) How is the implementation of mediation in the Religious Tulungagung terms of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. The purpose of this research is to describe the implementation of mediation in Tulungagung Religious Court and the Supreme Court in terms of Regulation No. 1 of 2016.

This research is useful for academics and practitioners courts as contributions to the mediation procedure to apply an appropriate referral. As well as for the government, as a material to improve the supervision and oversight of the importance of optimizing the completion snegketa with the deliberations.

This research was a case study (case study). In the process of implementation, this study used a qualitative descriptive approach focusing his studies on the mediation procedure. While the data is retrieved using interviews with the mediators and the parties to the dispute in the Religious Tulungagung and observation and documentation in the court environment. Furthermore, the data is processed and sorted for then analyzed using qualitative descriptive method.

Based on the research results, it could be concluded that (1) based on research results and data from the trial is known that the mediation process is comprised of pre mediation, the mediation process and post-mediation (2) The court did indirectly Religious Court Tulungagung has run PERMA No. 1 2016 on Mediation Procedure in court. But some things were also not able to resume are conducted as well as of the parties. Parties to the religious court argued it is more difficult to run this resume considering the manufacture will cut the time mediation.